

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN NANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2022

## Daftar isi

Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif .....	3
Bab I      Pendahuluan .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	15
Bab II     Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	17
Bab III    Akuntabilitas Kinerja .....	20
A. Pengukuran Kinerja .....	20
B. Analisis Kinerja.....	21
C. Realisasi Anggaran .....	22
D. Analisis Efisiensi .....	25
Bab IV    Penutup .....	26



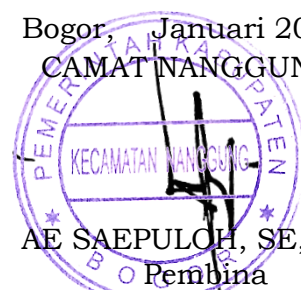
## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/317-ORG Tanggal 10 November 2022 Hal Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Atas dasar acuan tersebut penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, disusun sesuai dengan format yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Nanggung menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Nanggung yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Nanggung tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Nanggung pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Bogor, Januari 2023  
CAMAT NANGGUNG



A.E. SAEPULOH, SE, M.A  
Pembina

NIP. 197011221994031004





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kecamatan Nanggung Merupakan Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai Dengan Peraturan Bupati Bogor No.98 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Nanggung Mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan/Atau Kelurahan, Pembangunan, Dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan Serta Melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati Berdasarkan Pelimpahan Wewenang. Selain Tugas tersebut, Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 (Tiga) Diatas, Kecamatan Nanggung Menyelenggarakan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 3 (Tiga) Diantaranya:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.



Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Kecamatan Nanggung terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Kecamatan Nanggung telah tercapai, yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Secara rinci Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Nanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan. yang terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik dengan capaian 100%;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan, terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan, tercapai memuaskan dengan capaian 100%.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Nanggung merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Nanggung, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Kecamatan Nanggung berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip **Good Governance dan Clean Governance**.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

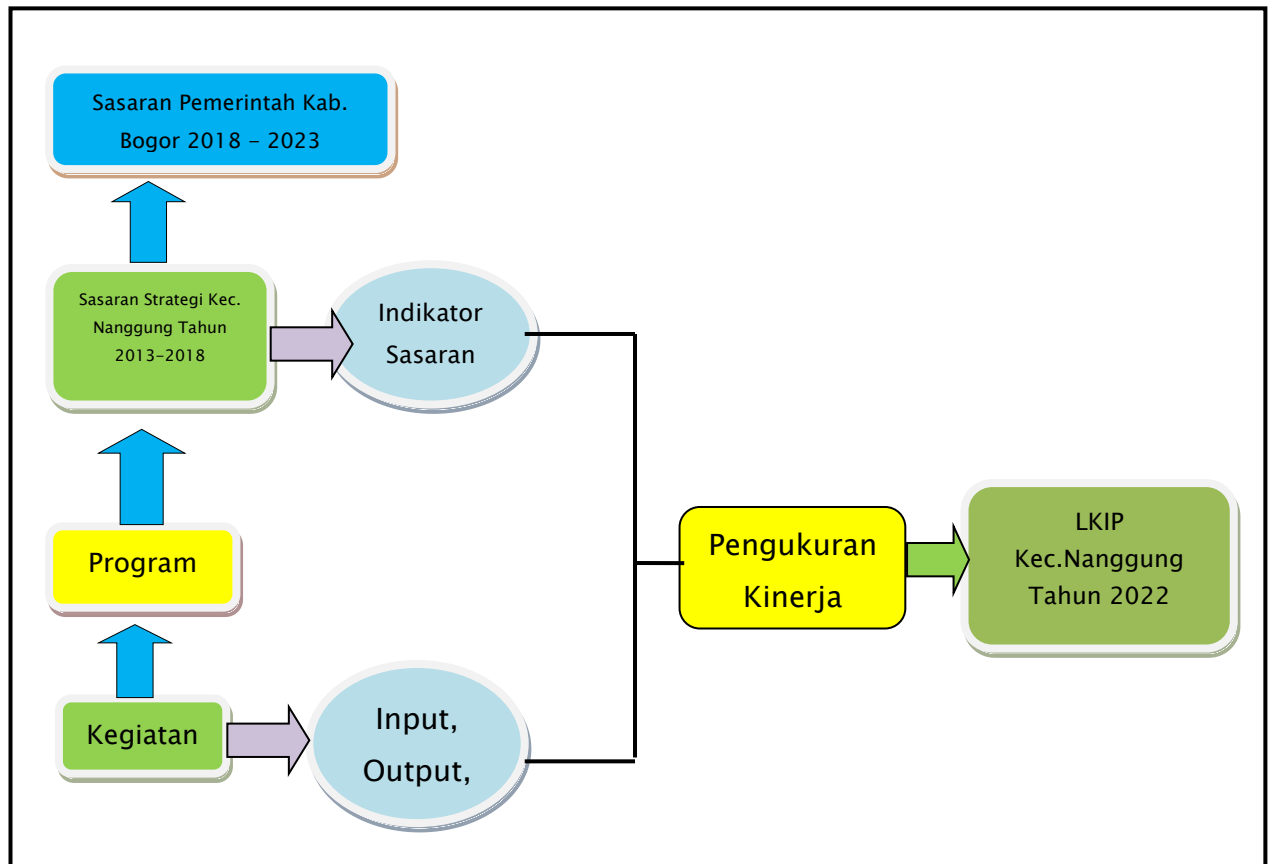
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Bogor, Kecamatan Nanggung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Indikator kinerja sasaran



menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tahun 2022, disajikan dalam diagram 1.1 sebagai berikut:

**Diagram 1. Alur Pikir Pengukuran kinerja**



## B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain :

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;





2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Nanggung sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Nanggung secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Nanggung;
5. Bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Nanggung.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu **“ Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju, Aman dan Berkeadaban “**



Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Nanggung harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2018-2023 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;



- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan
- j. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Nanggung adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretariat, yang membawahkan :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 7. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- 8. Kelurahan;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

#### **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Kecamatan;
- b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;



- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Kecamatan.

### **3. Sub Bagian Program dan Keuangan**

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Sub bagian program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan penyusunan anggaran kecamatan;
- e. Penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
- d. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **5. Seksi Pemerintahan**

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) menyiapkan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
- b) menyiapkan bahan pengoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d) pelaksanaan evaluasi kelurahan;
- e) pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- f) pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g) pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- h) penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan nonperizinan;
- i) pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- j) pelaksanaan laporan kependudukan;
- k) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- l) menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pemerintahan; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



## **6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- d) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- e) fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
- f) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- g) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



## **7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) menyiapkan bahan perencanaan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b) menyiapkan bahan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal ketentraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban;
- g) pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- h) pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- i) penanganan konflik sosial;
- j) pengembangan kehidupan demokrasi;
- k) fasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l) penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- m) pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n) menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- e) pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- f) pengoordinasian dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g) pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- h) fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;





- i) fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- j) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- k) penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **9. Seksi Pendidikan dan Kesehatan**

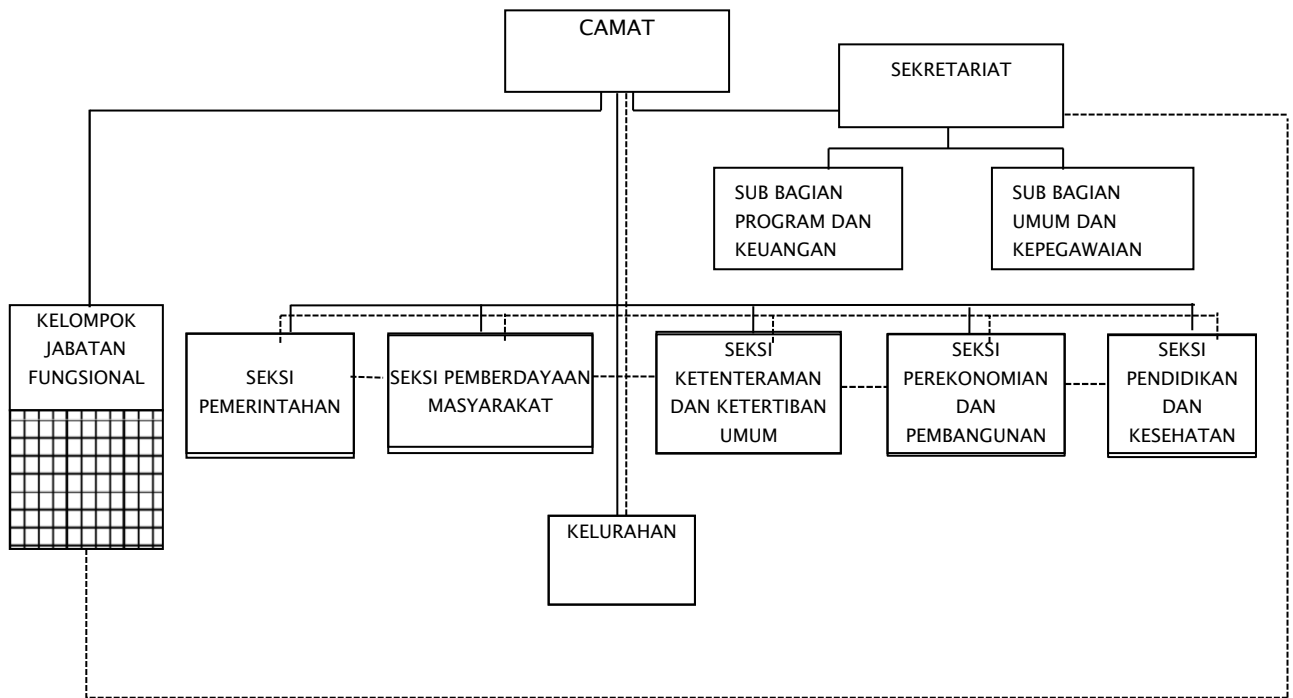
Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kesehatan. Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c) fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- d) fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e) pembinaan kegiatan kepramukaan;
- f) pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- g) fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
- h) fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir;
- i) pengoordinasian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- j) penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan



1) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### D. Struktur Organisasi



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Kecamatan Nanggung tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nanggung Tahun 2018 – 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Nanggung Tahun 2022.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Nanggung Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

Rencana Strategis ( Renstra-SKPD ) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nanggung yang memuat visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan, strategi,



kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Nanggung. LAKIP Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kedamean yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Nanggung tahun 2018-2023 sebagai berikut :

#### A. Rencana Strategis Tahun 2018 -2023

Adapun sasaran rencana strategis tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nanggung.**

Sasaran	Indikator	Target					Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Sebelum Perubahan Renstra</b>							
Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan efisien	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	72	75	0	0	0	75
<b>Setelah Perubahan Renstra</b>							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	0	0	100	100	100	100



di kecamatan;							
Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan			100	100	100	100

Rencana strategis tahun 2021 mengalami perubahan sasaran, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor, sehingga kondisi rencana program mengalami perubahan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.2. Perbandingan Sasaran dan Program Tahun 2019, 2020, 2021 & 2022**

Sasaran 2019	Sasaran 2020	Sasaran 2021	Sasaran 2022	Program 2019	Program 2020	Program 2021	Program 2022
Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan;	1. Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	2. Meningkatkan Pembinaan Kecamatan	2. Meningkatkan Pembinaan Kecamatan	2. Meningkatkan Pembinaan Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
				Program Peningkatan Kinerja Desa/ Kelurahan	Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Program Penjangkangan Aspirasi		Program Penyelenggaraan	Program Penunjang Urusan



				Masyarakat		Urusan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/Kecamatan Nanggung 19 Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Target
<b>Utama</b>		
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, fasilitasi dan	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di	100%



koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan	kecamatan yang tertangani dengan baik	
2. Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	100%



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun 2022 yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Nanggung Kab. Bogor  
Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	100%	100%	100%
	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan				

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
			REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	6	9			$9 = (8/7) \times 100\%$
	2019							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%		72				
	SASARAN							
	Tingkat Pelayanan yang akuntabel	%	100	100				
	Tingkat Koordinasi	%	100	100				
	OUTCOME							
	2019							
	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5	5				
	Koordinasi penjarangan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3	3				
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16	15				
	Pembinaan Oleh Kecamatan	Kegiatan	2	2				
	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan		10				
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan		8				
	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan						
	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan		7				
	2020							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%		72	75			
	SASARAN							
	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%		72	76,96			



	Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/kelurahan	%			92,03		
	Tingkat pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran	%			60		
	OUTCOME						
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%			100		
	Persentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%			100		
	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%			80		
	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%			104		
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%			133		
	Persentase perencanaan sesuai target	%			125		
	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%			129		
	Persentase Pelayanan Kepegawaian	%			133		
	<b>2021</b>						
	Indikator Tujuan PD						
	Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Terhadap Pelayanan	Poin				70	
	Indikator Sasaran PD						
	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%				90	



	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%				90		
	Indikator Outcome Program PD							
	1. Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	%				60	60	100
	2. Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	%				100	100	100
	3. Persentase penanganan gangguan trantibum	%				100	100	100
	4. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%				100	100	100
	5. persentase jumlah desa tertib administrasi	%				95	95	100
	6. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				100	100	100



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

URUSAN : KEWILAYAHAN  
 BIDANG URUSAN : -  
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI			2021		
				2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100
	(Kegiatan tahun 2019)								
60 01	11	Program Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan					
	0006	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jenis lomba MTQ yang di laksanakan	Jenis		8			

					Jumlah peserta MTQ TK.Kecamatan	Org		150				
					Jumlah peserta yang di kirim ke TK.Kabupaten	Org		40				
			0009	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah perayaan hari besar keagamaan yang di laksanakan	Kegiatan		3				
			0010	Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah	Jumlah Peringatan besar nasional yang selenggarakan	Kali		3				
	60 01	12		<b>Program Peningkatan Kinerja Kecamatan</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kegiatan</b>						
			0001	Penyusunan Monografi Kecamatan	Jumlah Dokumen Monografi Kecamatan Yang disusun	Dokumen		2				

			0002	Penataan Adminitrasi Pertanahan	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen		2				
			0003	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali		1				
			0004	Pembinaan Masalah Sosial	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali		1				
			0005	Pembinaan Perberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali		3				
			0006	Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen ADM Kependudukan	Dokumen		8				

			0007	Pembinaan dan Pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali		1				
			0008	Penyelenggaraan Lomba - Lomba Tingkat Kecamatan, Kabupten, Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan lomba lomba yang dilaksanakan	Kali		4				
			0009	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli trantibum yang dilaksanakan	Desa		15				
			0011	Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Pembinaan yg dilakukan	Kali		2				

			0012	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali		1				
			0013	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali		1				
			0014	Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali		1				
			0015	Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali		1				



			0016	Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali		1			
			0018	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Dokumen PATEN	Dok		12			
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>13</b>		<b>Program Pembinaan Desa/Kelurahan</b>	<b>Pembinaan oleh Kecamatan</b>	<b>Kegiatan</b>					
			0001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Desa yang di Bina	Kali		7			
			0005	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Desa yang di Bina	Kali		7			

			0007	Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Jumlah Pembinaan Desa yang di Bina	Kali		7				
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>14</b>		<b>Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat</b>	<b>Kegiatan</b>						
			0001	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Kali		1				
			0003	Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan	Jumlah pelaksanaan minggon kecamatan	Kali		35				
			0005	Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan		3				
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Kegiatan</b>						

			0001	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang di bayarkan	Jenis		2				
			0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	unit		5				
			0003	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan yang di butuhkan	Org		4				
					jumlah alat kebersihan kantor yang dibutuhkan	Jenis		6				
			0021	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Jenis		10				
			0022	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Jenis		2				

			0023	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang dibutuhkan	Jenis		4				
			0027	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	DD		28				
						DL		60				
			0041	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah dokumen dan arsip yang di tata	Dok		12				
					Jumlah Jasa Tenaga Kerja yang di biyai	Orang		1				
			0042	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di kelola	Dokumen		5				

			0043	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang	Dokumen		5				
			0044	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor yang di butuhkan	Org		4				
	60 01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Kegiatan</b>						
			0101	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Gedung yang di Rawat	Gedung		1				
			0102	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang di Rawat	Gedung		1				
			0106	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Luas Taman Yang di Rawat	meter		400				

			0110	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit		5				
			0112	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Rawat/Service	unit		20				
			0113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan yang di butuhkan	Instalasi		3				
	60 01	03		<b>Program Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya disiplin aparatur</b>	<b>Kegiatan</b>						
			0003	Pengadaan Kartu Pengenal	Jumlah Kartu yang dibuat	buah		57				

			0052	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang di perlukan	Stell		26				
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD</b>	<b>Kegiatan</b>						
			0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Kantor	Dok		9				
					Jumlah Tenaga Kerja yang di biyai	Org		1				
			0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan	Dok		2				
			0003	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan akhir tahun SKPD	Dok		1				

			0004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	Dok		4				
			0005	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan	Dok		12				
					Jumlah Jasa Tenaga Kerja yang dibiayai	Org		1				
			0007	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan kecamatan yang di publikasikan	Kali		4				
			0008	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja 2019	Dok		2				
					Jumlah dokumen Renja Perubahan 2019							



			0009	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang dibuat	Dok		1			
				<b>Kegiatan Tahun 2020</b>							
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>21</b>		<b>Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan</b>	%		<b>100</b>			
			0001	Penyelenggaraan forum Fasilitasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan forum Fasilitasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan	Kegiatan		1			
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>22</b>		<b>Program Peningkatan Kinerja Kecamatan</b>	<b>Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan</b>	%		<b>100</b>			
			0001	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kegiatan		3			

			0002	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Kegiatan			4			
			0003	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kegiatan			4			
			0004	Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Kegiatan			3			
			0005	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kegiatan			4			
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>24</b>		<b>Program Fasilitas Kegiatan PD</b>	<b>Persentase Fasilitas Kegiatan PD</b>	<b>%</b>			<b>100</b>			

			0001	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kegiatan				1			
			0002	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan				3			
			0003	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Kegiatan				0			
			0004	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan				1			
			0005	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pelayanan	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pelayanan	Kegiatan				1			

	60	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan</b>	%			75			
					<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai</b>	%			75			
					<b>Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target</b>	%			75			
					<b>Persentase pelayanan kepegawaian</b>	%			75			
			0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis			2			

			0051	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Arsip yang ditata	Dokumen			12			
			0052	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor yang di butuhkan	Orang			4			
			0053	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan yang di biayai,	Orang			4			
					Jumlah alat kebersihan kantor yang di butuhkan	Jenis			10			
			0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di bayar pajaknya	Unit			3			
			0203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan	Unit			1			
			0351	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang dirawat	Gedung			1			

			0354	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice	Unit			5		
			0356	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dirawat	Unit			10		
			0450	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilakukan dalam rangka koordinasi ke Dinas	DL			80		
			1003	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di kelola	Dokumen			12		
			2001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan	Dokumen			2		
			2002	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen			12		

			2003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dibuat	Dokumen				5			
			2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	Dokumen				2			
			2005	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang dibuat	Dokumen				2			
			2006	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan yang dibuat	Dokumen				1			
			2008	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kecamatan Yang dipublikasikan	Dokumen				5			
				<b>Kegiatan Tahun 2021</b>									
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil kKoordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang ditindaklanjuti	%				52	52	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%				100	99	99



				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang telah tersusun laporannya	%				100	100	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	%				0	0	#DIV/0!
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan yang terlayani persentase Jumlah pelayanan perizinan yang terlayani	Jenis				0	0	#DIV/0!
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah</b>	%				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	%				100	100	100
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Jenis				1	1	100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan	%				100	100	100
				Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah patroli satgas penangan Covid 19 di tingkat desa terlaksananya Penanganan Covid-19 Tk Desa	Kali				216	216	100
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase patrolibersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%				50	50	100
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pembinaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	%				100	100	100
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	%					100	100	100
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%					100	100	100
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%					0	0	#DIV/0!

				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%					0	0	#DIV/0!
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%					100	100	100
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditangani	%					0	0	#DIV/0!
				Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%					100	100	100

				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase rapat dan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	%					100	100	100
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase jumlah desa tertib administrasi</b>	<b>%</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan</b>	<b>%</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina	Desa					11	11	100
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terbina	%					100	100	100

				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pembinaan Penegakan Perda	%				0	0	#DIV/0!
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa yang dibina	%				100	100	100
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	%				100	100	100
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%				100	100	100
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kualitas Linmas	%				100	100	100
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	%				100	100	100

				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase hasil usulan MUSRENBANG yang	%				100	100	100
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekbang	%				100	100	100
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	presentase jumlah kegiatan samisade yang terealisasi	%				100	100	100
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%				100	100	100
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok				2	2	100
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Dok				2	2	100
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	Dok				1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Dok				1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dok				3	3	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dok				5	5	100

				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Orang				25	25	100
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai	Orang				0	0	#DIV/0!
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Dok				6	6	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok				0	0	#DIV/0!
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Dok				0	0	#DIV/0!
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dok				14	14	100

				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	Dok				12	12	100
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dok				3	3	100
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang	Dok				3	3	100
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian KORPRI yang diperlukan	Stell				0	0	#DIV/0!

				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dok				3	3	100
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SKP	Laporan				25	25	100
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang disediakan</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan/perlengkapan Kantor yang di Butuhkan	Unit				3	3	100
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang di gandakan	Jenis				5	5	100
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	Dok				12	12	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis				3	3	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang				10	10	100
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dipelihara</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang di service dan dibayar pajaknya	Unit				5	5	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang di rawat	Unit				4	4	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rumah Dinas yang di Cat Ulang	Unit				0	0	#DIV/0!

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang di Cat Ulang	Unit				0	0	#DIV/0!
				Kegiatan Tahun 2022								
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan</b>	<b>%</b>						<b>100</b>
				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan</b>	<b>%</b>						<b>100</b>
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang ditindaklanjuti	%						
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	%						
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%						

				Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang telah tersusun laporannya							
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang telah tersusun laporannya	%						
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%						
				<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan</b>	%						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	%						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	%						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Persentase pelayanan masyarakat pada	%						

				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bidang Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah</b>	%						
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diselenggarakan</b>	%						
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	presentase jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%						
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Perseentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%						
				<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	%						
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kali						
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Jenis						



				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Persentase patroli penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan</b>	%						
				Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah patroli satgas penangan Covid 19 di tingkat desa	%						
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum</b>	%						
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase patroli dan pembinaan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>	%						
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase patrolibersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%						
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pembinaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	%						

				<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase patroli bersama Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan</b>	%						
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Jumlah patroli Penegakan PerUU/ PERDA/ PERBUB yang dilaksanakan	%						
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan</b>	%						
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah telah tersusun laporannya</b>	%						
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%						

				1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%						
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%						
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	%						
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditangani	%						
				Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Persentase Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	%						
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase rapat dan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	%						

				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase jumlah desa tertib administrasi</b>	<b>%</b>						
				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan</b>	<b>%</b>						
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina	%						
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terbina	%						
				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pembinaan Penegakan Perda	%						
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa yang dibina	%						
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	%						
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%						
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kualitas Linmas	%						
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	%						
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Presentase hasil usulan MUSRENBANG	%						

				Pembangunan Partisipatif yang menjadi prioritas								
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Pelaksanaan Penetapan Batas Desa	%						
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%						
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	presentase jumlah kegiatan samisade yang terealisasi	%						
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%						
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	%						
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	%						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Dok						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Dok						

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	Dok						
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Dok						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dok						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dok						
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>%</b>						
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dok						
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dok						
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang	Dok						
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi</b>	<b>%</b>						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dok						

				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SKP	Laporan						
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>%</b>						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Orang						
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	Dok						
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Dok						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok						
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Dok						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dok						
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	Dok						

				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang disediakan</b>	<b>%</b>						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan/perlengkapan Kantor yang di Butuhkan	Unit						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik	Jenis						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang di gandakan	Jenis						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	Kali						
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Jenis						
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>%</b>						
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diperlukan	unit						
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>	<b>%</b>						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	Dok						



				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang						
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dipelihara</b>	<b>%</b>						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rumah Dinas yang di Cat Ulang	unit						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang di service dan dibayar pajaknya	unit						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang di rawat	unit						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang di Cat Ulang	unit						

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Nanggung telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata  $\geq 100\%$  dari target.

Adapun pada perubahan Renstra Kecamatan Nanggung uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 = **“Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan”**

Indikator	2018	2022			Capaian 2022 thdp 2023
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	Na	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	

Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan, memiliki 1 indikator yaitu Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan 1 indikator adalah sebesar 100%.

Indikator 1 pada sasaran 1 diperoleh dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase jenis} \\
 & \text{pelayanan di} \\
 & \text{kecamatan yang} \\
 & \text{tertangani} \\
 & \text{dengan baik} \\
 & = \frac{\text{Jumlah target pelayanan} \\
 & \text{di kecamatan}}{\text{jumlah pelayanan yang} \\
 & \text{dilaksanakan}} \times 100\%
 \end{aligned}$$



Adapun target dari pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Nanggung pada tahun 2022 ada 8 (delapan) jenis pelayanan, yaitu:

1. Administrasi kependudukan seperti KTP El, Kartu Keluarga dan Surat Pindah
2. Perizinan seperti Ijin spanduk dan umbul – umbul, SIUP Makro, TDP Mikro, IUMK, Izin penyelenggaraan PAUD Non Formal, Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat, IPAJ, Izin pembangunan atau penembokan Makam di TPU, Izin penguburan dilahan pemerintah daerah, dan Izin Huller;
3. Non Perizinan seperti SKDP, Ijin Lingkungan, Surat Keterangan haji dan dispensasi nikah.

Target Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan mencapai nilai yang sangat baik yaitu 100%, Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Nanggung;
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan ( kotak saran, web pengaduan dan email );
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat;
5. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa desa dan pelayanan pada hari libur;

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan
  - Jumlah PNS Kecamatan Nanggung sebanyak 17 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Nanggung yang terdiri dari 11 desa;
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang
  - Ruang tunggu pelayanan masih kurang memadai;



- Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Rekrutmen Tenaga Non PNS;
2. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan;
3. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan Public;
4. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat dan aparatur desa tentang prosedur pelayanan ( Persyaratan, waktu dan biaya/gratis )
2. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas Vertikal (Disdukcapil dan Diskominfo) terkait dengan fasilitasi penunjang pelayanan/ jaringan internet;
3. Mengupayakan adanya fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.

Sasaran 2 = **“Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan”**

Indikator	2018	2022			Capaian 2022 thdp 2023
	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	Na	100%	100%	100%	100%

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah cara untuk dapat mengukur seberapa besar tingkat realisasi anggaran kegiatan Desa yang telah dilaksanakan, tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan Desa/Kelurahan dan Tingkat Pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran diperoleh dari hasil monitoring langsung kelapangan dan mensinkronkannya dengan dokumen perencanaan anggaran Desa.



Adapun hasil dari Monitoring Pelaksanaan Tingkat Pelaksanaan Terhadap Perencanaan Desa/Kelurahan dan Tingkat Pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing Desa dalam merealisasikan anggaran Desa;
2. Mengukur secara langsung tingkat keakuratan antara perencanaan dan realisasi;
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Monitoring dan Evaluasi tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan Desa/Kelurahan dan Tingkat Pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran di Kecamatan Nanggung pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap 11 Desa di Kecamatan Nanggung yang memperoleh Anggaran Dana Desa. Pelaksanaan Monitoring tersebut ada 3 (jenis) jenis pengecekan, yaitu:

1. Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes, APBDes, RPJMDes, LPPDes);
2. Dokumen Realisasi Anggaran;
3. Monitoring Fisik Pembangunan.

**Sasaran 2 Meningkatnya Pembinaan Kecamatan** dapat diukur keberhasilannya melalui indikator yaitu Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan, semakin banyak realisasi kegiatan yang tercantum dalam APBDes dan Semakin Banyak Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes, APBDes, RPJMDes, LPPDes) yang sesuai, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Nanggung tahun 2022 sebesar 100% (sangat baik). Ini merupakan tahun ke 1 dari target Perubahan Renstra Kecamatan Nanggung yang mengalami persentase sebesar 100%.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kecamatan selalu melakukan pembinaan terhadap Desa sehingga banyak Desa yang paham dalam merancang atau menyusun dokumen perencanaannya;
2. SDM aparatur Desa banyak yang memadai;

Namun dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :



1. Masih Adanya SDM Aparatur Desa yang kurang memadai;
2. Masih adanya Desa yang susah dijangkau sehingga sulit untuk Kecamatan melakukan monitoring ke Desa tersebut;

### **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tahun 2022 tertera pada tabel berikut :

**3.2 Tabel Realisasi Anggaran**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan	Rp.5.370.665.766	Rp.5.020.740.497	93,48%
2.	Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan			

### **C. Analisis Efisiensi**

Efisiensi realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan	99,19%	0,81%
2.	Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan Kecamatan		





## **BAB IV PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 Kecamatan Nanggung telah dicapai. yaitu dari 2 indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Nanggung antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Nanggung namun demikian, untuk tahun 2022, Kecamatan Nanggung tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait.
2. Meningkatkan Wawasan dalam melakukan pekerjaan.
3. Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja agar produktifitas dalam bekerja meningkat.

Bogor, Februari 2022

CAMAT NANGGUNG



AE SAEPULOH, SE, M.A

Pembina

NIP. 197011201994031004

